



MANAJEMEN KURIKULUM MUATAN LOKAL BERBASIS PESANTREN

**Penulis
Siti Zulfah**

**Editor
Imam Satibi**



MANAJEMEN KURIKULUM MUATAN LOKAL BERBASIS PESANTREN

Penulis
Siti Zulfah

Editor
Imam Satibi

MANAJEMEN KURIKULUM MUATAN LOKAL BERBASIS PESANTREN

vi + 82 hlm.; 14 x 20 cm

ISBN: 978-623-09-2893-2

Penulis : Siti Zulfah
Editor : Imam Satibi
Tata Letak : FidyA Arie Pratama
Desain Sampul : Farhan Saefullah
Cetakan 1 : April 2023

Copyright © 2023 by Penerbit PT Arr rad Pratama
Bekerja Sama dengan IAINU Kebumen Press
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit PT Arr Rad Pratama
Anggota IKAPI
Gedung Nurul Yaqin Cirebon – Jawa Barat Indonesia 45151
Cirebon Telp. 085724676697
e-mail: ptarradpratama@gmail.com
Web : <https://arradpratama.com/>

KATA PENGANTAR

Pendidikan Islam di Indonesia menekankan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri sebagai warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena itu, sasaran utama pendidikan Islam adalah berusaha mengembangkan manusia seutuhnya yang dilaksanakan pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan, salah satunya adalah madrasah.

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama dan memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Dilihat dari realitas kehidupan di tengah-tengah masyarakat, minimnya pengetahuan moral dan agama pada generasi milenial memberikan permasalahan baru yang harus dihadapi madrasah untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman yang selalu berubah. Mata pelajaran yang diajarkan di madrasah dianggap cukup memberikan wawasan yang luas tentang

pendidikan agama Islam, namun pada kenyataannya lulusan madrasah masih terlihat rendah dalam berbagai bidang, baik agama maupun umum

Buku ini terdiri dalam VIII Bab dimana dalam Bab I membahas tentang Urgensi Manajemen Kurikulum Muatan Lokal Di Pesantren, Bab II membahas tentang Manajemen Kurikulum, Bab III membahas tentang Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum, Bab IV membahas tentang Prinsip Dan Fungsi Manajemen Kurikulum, Bab V membahas tentang Kurikulum Muatan Lokal, Bab VI membahas tentang Sumber Bahan Pelajaran Muatan Lokal, Bab VII membahas tentang Kurikulum Pesantren, dan Bab VIII membahas tentang Metode Implementasi Kurikulum Pesantren

Penulis menyadari bahwa buku ini belum tertulis dengan sempurna dan banyaknya kekurangan. Oleh sebab itu, penulis membutuhkan banyak kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Kebumen, April 2023

Siti Zulfah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I URGENSI MANAJEMEN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI PESANTREN	1
BAB II MANAJEMEN KURIKULUM	6
A. Pengertian Manajemen Kurikulum	6
B. Komponen Manajemen Kurikulum	12
1. Komponen Tujuan	12
2. Komponen Isi	13
3. Komponen Metode	13
4. Komponen Evaluasi	13
BAB III RUANG LINGKUP MANAJEMEN KURIKULUM	15
A. Perencanaan Kurikulum	16
B. Pengorganisasian Kurikulum	21
C. Pelaksanaan Kurikulum	26
D. Pengawasan Kurikulum	29
E. Evaluasi Kurikulum	31
BAB IV PRINSIP DAN FUNGSI MANAJEMEN KURIKULUM	36
A. Prinsip Manajemen Kurikulum	36
B. Fungsi Manajemen Kurikulum	38
BAB V KURIKULUM MUATAN LOKAL	41
A. Pengertian Kurikulum Muatan Lokal	41
B. Landasan Kurikulum Muatan Lokal	42

C. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	45
D. Fungsi dan Tujuan Kurikulum Muatan Lokal	46
E. Tujuan Kurikulum Muatan Lokal	48
F. Ruang Lingkup Muatan Lokal	49
BAB VI SUMBER BAHAN PELAJARAN MUATAN LOKAL	52
BAB VII KURIKULUM PESANTREN	55
A. Pengertian Kurikulum Pesantren	55
B. Tujuan Kurikulum Pesantren	58
C. Elemen-Elemen dalam Kurikulum Pesantren	60
1. Pondok atau Asrama	60
2. Masjid	62
3. Pengajaran Kitab Kuning	63
4. Santri	64
5. Kiai	66
BAB VIII METODE IMPLEMENTASI KURIKULUM PESANTREN	68
A. Implementasi Kurikulum di Pesantren	68
B. Evaluasi Kurikulum Pesantren	70
DAFTAR PUSTAKA	74
PROFIL PENULIS	82

BAB I

URGENSI MANAJEMEN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI PESANTREN

Pendidikan Islam di Indonesia menekankan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri sebagai warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena itu, sasaran utama pendidikan Islam adalah berusaha mengembangkan manusia seutuhnya yang dilaksanakan pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan, salah satunya adalah madrasah.

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama dan memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Dilihat dari realitas kehidupan di tengah-tengah masyarakat, minimnya pengetahuan moral dan agama pada generasi milenial memberikan permasalahan baru yang harus dihadapi

madrasah untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman yang selalu berubah. Mata pelajaran yang diajarkan di madrasah dianggap cukup memberikan wawasan yang luas tentang pendidikan agama Islam, namun pada kenyataannya lulusan madrasah masih terlihat rendah dalam berbagai bidang, baik agama maupun umum.

Madrasah sebagai sekolah umum yang bercirikan Islam harus selalu meningkatkan sumber daya manusianya, baik Iman dan Taqwa (IMTAQ) maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pengembangan madrasah menuju sekolah umum yang bercirikan agama Islam sebenarnya telah disusun pada saat Mukti Ali menawarkan konsep pengembangan madrasah melalui SKB 3 Menteri yaitu (MENAG, MENDIKBUD dan MENDAGRI) yang berupaya menyelaraskan kualitas madrasah dengan non madrasah dengan porsi kurikulum 70% madrasah, 30 % umum.

Pada periode Menteri Agama Munawir Sadzali beliau menawarkan adanya Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) untuk memberikan keseimbangan bagi lulusan madrasah, sedangkan pada periode Menteri Agama Tarmidhi Tahir menawarkan konsep madrasah sebagai sekolah umum yang bercirikan Islam.

Pendirian madrasah dilatarbelakangi oleh setidaknya tiga alasan utama, yaitu: upaya perbaikan sistem pendidikan pesantren, penyesuaian sistem pendidikan Barat, upaya menjembatani sistem pendidikan pesantren tradisional dengan sistem pendidikan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah sangat erat kaitannya dengan pondok pesantren yang sama-sama memiliki visi dan misi untuk mengembangkan Pendidikan Agama Islam agar setiap santri yang berakhlak mulia mampu menghadapi permasalahan di lingkungan sosial di era globalisasi.

Dalam proses pengembangan Pendidikan Agama Islam tentunya harus memperhatikan komponen-komponen penting dalam pendidikan. Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan adalah kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh para pengelola dan administrator terutama oleh guru dan kepala sekolah. Kurikulum adalah program pendidikan yang memuat berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara

sistematis berdasarkan norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran.

Kurikulum kelembagaan yang baik adalah kurikulum kelembagaan pendidikan yang berkembang dari dan untuk masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa institusi yang baik bergantung pada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi masyarakat Indonesia sangat heterogen dengan berbagai macam keragaman, seperti budaya, adat istiadat, suku, sumber daya alam, bahkan sumber daya manusia. Setiap daerah memiliki kesiapan dan kemampuan yang berbeda dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan.

Kebutuhan pendidikan di masyarakat akan menjadi komponen penting untuk merancang sebuah kurikulum. Dengan berbagai potensi daerah, kurikulum yang tepat untuk diterapkan adalah kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa muatan

lokal adalah bahan kajian yang bertujuan untuk membentuk pemahaman kepada peserta didik tentang potensi yang ada di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 pasal 2 mendefinisikan muatan lokal sebagai bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang memuat muatan dan proses pembelajaran tentang potensi daerah dan keunikan daerah untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi daerah di tempat tinggalnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa muatan lokal penting untuk dijadikan bahan pembelajaran disuatu lembaga pendidikan.

Seperti kita ketahui, pengembangan kurikulum muatan lokal lebih menitikberatkan pada aspek ilmu umum, sedangkan kurikulum muatan lokal berbasis keagamaan masih jarang ditemui. Selain itu, masih ada siswa di SD/MI yang merasa kurang pengetahuan tentang agama Islam meskipun telah mengikuti kegiatan pembelajaran di luar madrasah seperti Taman Pendidikan AL-Qur'an (TPQ)

BAB II

MANAJEMEN KURIKULUM

A. Pengertian Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum berasal dari dua kata yaitu manajemen dan kurikulum. Nickels dan McHugh menulis bahwa “*management*” merupakan “*the process used to accomplish organizational goals through planning, organizing, directing, and controlling people and other organizational resources.*” Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

Manajemen telah diberi batasan sebagai “seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang” (“*the of getting things done through people*”). Batasan atau definisi manajemen oleh Mary Parker Follet ini patut mendapat perhatian berdasarkan kenyataan bahwa manajer dalam mencapai tujuan organisasi yaitu dengan cara mengatur orang-orang lain untuk menjalankan tugas-tugas apa pun

yang perlu, bukan dengan menjalankannya sendiri tugas-tugas tersebut.

Manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan dengan sadar secara terus menerus dalam membentuk sebuah organisasi. Semua organisasi mempunyai orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai sasarannya. Orang ini disebut manajer.

Manajemen menurut G.R. Terry adalah *“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources”*.

Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (P3) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah/madrasah yang meliputi: perencanaan program sekolah/madrasah, pelaksanaan program sekolah/

madrasah, kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, pengawas atau evaluasi dan sistem informasi sekolah/madrasah.

Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam konsep manajemen diantaranya:

- a. Manajemen merupakan suatu proses sosial yang merupakan proses kerjasama antar dua orang atau lebih secara formal.
- b. Manajemen dilaksanakan dengan bantuan sumber-sumber, yakni: sumber manusia, sumber material, sumber biaya, dan sumber informasi.
- c. Manajemen dilaksanakan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien, dari segi tenaga, dana dan waktu.
- d. Manajemen mengacu pencapaian tujuan tertentu, yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara bersama oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada organisasi tersebut.

Kurikulum berasal dari Bahasa Latin Curriculum, yang berarti *a running course, specially a chariot race course*. Dalam Bahasa Perancis *Courir* artinya *to run* yaitu berlari. Istilah ini digunakan untuk sejumlah course atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai gelar atau ijazah.

Istilah kurikulum menurut Beuchamp diartikan sebagai rencana pengajaran dan sebagai suatu sistem. Sebagai rencana pengajaran, kurikulum berisi tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat-alat pengajaran dan jadwal waktu pengajaran. Sedangkan sebagai sistem kurikulum merupakan bagian atau subsistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau sistem sekolah.

Definisi kurikulum menurut J. Galen Saylor dan William M. Alexander dalam buku *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning* (1956) menjelaskan arti kurikulum yaitu: "*The curriculum is the sum total of school's efforts to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school.*" Artinya, usaha sekolah untuk

mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah atau di luar sekolah termasuk kurikulum. Kurikulum juga ekstrakurikuler.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengaturan yang disusun secara sistematis berkaitan dengan seluruh kegiatan belajar mengajar, baik di laksanakan di dalam maupun di luar sekolah.

Manajemen kurikulum merupakan proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Dalam menjalankan manajemen kurikulum harus memperhatikan fondasi filosofis tentang kurikulum yang di rancang untuk persiapan di masa mendatang. Hal ini membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk memberikan laporan

kurikulum yang dijalankan saat ini yang kemudian akan di perbaiki untuk kebutuhan pendidikan yang lebih baik.

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Selanjutnya, Syafruddin Nurdin berpendapat bahwa manajemen kurikulum diartikan sebagai suatu proses mengarahkan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara maksimal sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dari pengajaran oleh pengajar. Kemudian dijelaskan mengenai aktivitas kurikulum yang merupakan kolaborasi antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah serta peran guru dalam melakukan kegiatan manajerial agar perencanaan berlangsung dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen kurikulum adalah suatu pengelolaan kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi mengenai berbagai kegiatan pengajaran baik isi, tujuan dan cara pembelajaran untuk mencapai visi misi yang

diterapkan pada suatu lembaga pendidikan. Manajemen kurikulum yang baik disusun berdasarkan kebutuhan dan situasi atau kondisi yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, manajemen kurikulum berkaitan dengan seluruh stakeholder sekolah/madrasah termasuk masyarakat itu sendiri.

B. Komponen Manajemen Kurikulum

Dalam proses merancang kurikulum hal yang paling utama adalah menentukan isi atau komponen yang ada dalam kurikulum dimana komponen tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain. Secara rinci komponen dalam manajemen kurikulum diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen Tujuan

Tujuan kurikulum merupakan sesuatu yang diwujudkan atau sesuatu yang hendak dicapai oleh siswa berkaitan dengan konten/isi dari sesuatu yang akan diwujudkan. Tujuan dari kurikulum menggambarkan kompetensi yang diharapkan ada pada siswa. Tujuan tersebut dapat diartikan sebagai tujuan mata pelajaran atau tujuan kurikuler.

2. Komponen Isi

Komponen isi dalam manajemen kurikulum berkaitan dengan materi yang merujuk pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dan mencakup seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran. Isi kurikulum tersebut biasanya berhubungan dengan tujuan pengajaran.

3. Komponen Metode

Metode adalah cara guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Metode tersebut berhubungan dengan siasat atau taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan kurikulum secara sistemik dan sistematis. Sistemik berarti keterkaitan antara komponen kurikulum sehingga dapat terorganisasikan. Sedangkan sistematis berarti langkah-langkah yang dilakukan guru secara berurutan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan.

4. Komponen Evaluasi

Evaluasi adalah pedoman yang dijadikan tolak ukur dalam menilai kemajuan peserta didik dalam proses belajar. Evaluasi diterapkan dalam kegiatan pembelajaran

dimaksudkan untuk melihat perubahan tingkah laku peserta didik baik dalam kemampuan pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Adanya evaluasi dapat diketahui seberapa efektif penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai keberhasilan belajar peserta didik.

BAB III

RUANG LINGKUP

MANAJEMEN KURIKULUM

Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kurikulum. Pada satuan tingkat pendidikan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang berintegritas dengan peserta didik mau pun di lingkungan sekolah itu berada.

Dalam hal ini ruang lingkup manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kurikulum yang biasa digunakan oleh sebuah organisasi dalam berbagai situasi, karena untuk menentukan sebuah prinsip dalam manajemen perlu memperhatikan keadaan baik dari eksternal maupun internal agar prosesnya berjalan dengan maksimal. Berikut penjelasan secara rinci mengenai ruang

lingkup manajemen kurikulum yang telah disebutkan di atas:

A. Perencanaan Kurikulum

Pengertian dari perencanaan yaitu cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berhubungan dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang primer, yakni tahapan yang mendahului dan menjadi fondasi terhadap fungsi manajemen yang lain.

Merencanakan mengandung arti bahwa manajer memikirkan dengan matang terlebih dahulu mengenai sasaran dan tindakan berdasarkan pada beberapa metode, rencana, atau logika dan bukan berdasarkan perasaan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Rencana merupakan pedoman untuk organisasi memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, anggota organisasi melaksanakan aktivitas yang konsisten dengan tujuan dan prosedur yang sudah ditetapkan, dan memonitor serta mengukur kemajuan untuk mencapai

tujuan, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila kemajuan tidak memuaskan.

Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi.

Perencanaan kurikulum adalah sebuah perencanaan mengenai aktivitas belajar yang bertujuan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diharapkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa untuk kemudian dievaluasi. Perencanaan kurikulum dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang diperlukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Perencanaan kurikulum memiliki dua pendekatan yaitu: pendekatan yang bersifat “administrative approach” dan pendekatan yang bersifat “grass roots approach”. Pendekatan dengan administrative approach direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada instalasi

bawahan sampai pada guru- guru. Dalam kondisi ini guru-guru tidak dilibatkan. Mereka cenderung bersifat pasif sebagai penerima dan pelaksana di lapangan. Semua ide, gagasan dan inisiatif berasal dari pihak atasan.

Sedangkan pada pendekatan yang bersifat grass roots approach yaitu kebalikan dari pendekatan administrative approach, dimana perencanaan dimulai dari bawah yakni dari pihak guru atau sekolah secara individual dengan harapan bisa meluas ke sekolah-sekolah lain. Kepala sekolah serta guru merencanakan kurikulum karena melihat kekurangan kurikulum yang berlaku.

Langkah-langkah perencanaan yang baik dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut ini:

1. Menjelaskan dan merumuskan dahulu masalah, usaha, dan tujuan yang akan direncanakan itu.
2. Mengumpulkan data, informasi, dan fakta yang diperlukan secukupnya.
3. Menganalisis dan mengklasifikasikan data, informasi, dan fakta serta hubungan-hubungannya.
4. Menetapkan perencanaan, premises, dan hambatan-hambatan serta hal-hal yang mendorongnya.
5. Menentukan beberapa alternative.

6. Pilihlah rencana yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.
7. Tetapkanlah urutan-urutan dan penetapan waktu secara terinci bagi rencana yang diusulkan itu.
8. Laksanakanlah pengecekan tentang kemajuan rencana yang diusulkan.

Adapun model atau tipe-tipe perencanaan kurikulum yang ideal berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas, diantaranya sebagai berikut:

1. Model perencanaan rasional deduktif atau rasional Tyler, yaitu menitikberatkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan (goals and objectives) tetapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Model itu dapat diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan.
2. Model interaktif rasional (the rational-interactive model), yaitu memandang rasionalitas sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda, yang tidak mengikuti urutan logik. Perencanaan kurikulum dipandang sebagai suatu

masalah lebih “perencanaan dengan” (planning with) daripada “perencanaan bagi” (planning for). Seringkali model ini dinamakan model situasional, asumsi rasionalitasnya menekankan pada respons fleksibel kurikulum yang tidak memuaskan dan inisiatif pada tingkat sekolah atau tingkat lokal.

3. “The Disciplines Model”, perencanaan ini menitikberatkan pada guru-guru, mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematis tentang relevansi pengetahuan filosofis, (isu-isu pengetahuan yang bermakna), sosiologi (argumen-argumen kecenderungan sosial), psikologi (untuk memberitahukan tentang urutan-urutan materi pelajaran) demikian yang dikemukakan oleh Lawton,1973.
4. Model tanpa perencanaan (non planning model), adalah suatu model berdasarkan pertimbangan-pertimbangan intuitif guru- guru di dalam ruangan kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan, hanya sedikit upaya kecuali merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat, dan analisis intelektual.

Proses perencanaan ini merupakan langkah awal organisasi untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, proses perencanaan harus dirancang dengan matang untuk memperoleh hasil yang maksimal. Penggunaan model dalam perencanaan juga harus disesuaikan dengan budaya organisasi agar setiap anggota dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan baik, sehingga pada langkah selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil sesuai visi misi organisasi.

B. Pengorganisasian Kurikulum

Suatu program kerja atau segala kegiatan yang telah tersusun memerlukan tenaga atau bantuan orang lain yang terorganisasi agar program kerja tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan demikian, organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan. Pekerjaan terstruktur tersebut antara lain dapat berupa struktur organisasi, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), maupun pembagian tugas pekerjaan.

Organisasi memiliki pengertian suatu kelompok sosial yang bersifat tertutup maupun terbuka dari/terhadap pihak luar dan diatur berdasarkan aturan tertentu yang diperintahkan oleh seorang pemimpin atau seorang staf administratif yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan.

Pengorganisasian merupakan kegiatan menyusun struktur hubungan kerja anggota organisasi sehingga dapat berinteraksi dan bekerjasama dengan baik sesuai dengan tugas pekerjaan yang mereka lakukan sehingga dapat memberikan garis kewenangan dan bertanggung jawab penuh terhadap individu dan kelompok yang berbeda.

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara efektif.

Masing-masing organisasi terdapat suatu susunan kepengurusan yang ditentukan sesuai dengan struktur organisasi dengan tugas-tugas pekerjaan tertentu. Kepengurusan tersebut akan sangat membantu jalannya proses manajemen kurikulum yang terstruktur dan terarah

karena melibatkan seluruh stakeholder yang ada di suatu lembaga pendidikan.

Secara akademik, organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk-bentuk organisasi, yaitu:

1. Kurikulum mata ajaran, yang terdiri dari sejumlah mata ajaran secara terpisah.
2. Kurikulum bidang studi, yang memfungsikan beberapa mata ajaran sejenis.
3. Kurikulum integrasi, yang menyatukan dan memusatkan kurikulum pada topik atau masalah tertentu.
4. Core curriculum, yakni kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa.

Organisasi kurikulum sangat berkaitan dengan pengaturan bahan yang terdapat dalam kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mendukung tercapainya organisasi yang efektif dan efisien perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang ada dalam organisasi. Faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:41

1. Ruang lingkup (*scope*) dan urutan bahan pelajaran merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam suatu kurikulum. Setiap pola kurikulum memiliki ruang lingkup materi pelajaran yang berbeda. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran lingkup materi pelajarannya cenderung menyajikan bahan pelajaran yang bersumber dari kebudayaan dan informasi atau pengetahuan hasil temuan masa lalu yang telah tersusun secara logis dan sistematis. Dengan demikian, organisasi kurikulum integritas lingkup materi pelajarannya diambil dari masyarakat maupun aspek siswa (minat bakat dan kebutuhan) tidak hanya lingkup materi pelajaran yang harus diperhatikan dalam organisasi kurikulum, tetapi bagaimana urutan (*sequence*) bahan tersebut harus disajikan dalam kurikulum.
2. Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Pendekatan

spiral merupakan salah satu upaya dalam menerapkan faktor tersebut. Artinya materi yang dipelajari oleh siswa semakin lama semakin mendalam yang dikembangkan berdasarkan keleluasaan secara vertikal maupun horizontal.

3. Keseimbangan bahan pelajaran perlu dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Semakin dinamis perubahan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, social budaya maupun ekonomi akan berpengaruh terhadap dimensi kurikulum. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam keseimbangan pada sebuah organisasi kurikulum yakni: (a) keseimbangan terhadap substansi bahan atau isi kurikulum dan (b) keseimbangan yang berkaitan dengan cara atau proses belajar. Keseimbangan substansi isi kurikulum harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan siswa sebagai individu, tuntunan masyarakat maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek estetika, intelektual, moral, sosial-emosional, personal,

religious, seni apresiasi dan kinestetik, semuanya harus terakomodasi dalam isi kurikulum.

4. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus menjadi bahan pertimbangan dalam organisasi kurikulum.

Pengorganisasian kurikulum dilakukan untuk mempermudah proses kurikulum agar terarah dan terstruktur dengan memperhatikan sumber bahan pelajaran kurikulum agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien demi menunjang tercapainya tujuan dari kurikulum tersebut. Adanya organisasi kurikulum akan mempermudah siswa dalam mempelajari bahan/materi yang disampaikan oleh guru, sehingga kegiatan pembelajaran dengan organisasi yang baik akan berjalan secara maksimal.

C. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha dalam organisasi. Pelaksanaan juga dapat dikatakan

sebagai proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level manajerial maupun level operasional untuk mencapai visi misi organisasi.

G. R. Terry mengemukakan bahwa *actuating* atau pelaksanaan ialah usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota perusahaan tersebut, karena para anggota tersebut juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Menurut Nurdin, pelaksanaan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan-harapan yang digunakan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Implementasi atau pelaksanaan kurikulum menjadi bagian dari program kurikulum, prosesnya dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi program-program yang sudah direncanakan dan diorganisasikan dalam bentuk desain kurikulum

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah

dan tingkat kelas. Tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, sedangkan tingkat kelas yang berperan adalah guru. Walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru namun dalam pelaksanaannya senantiasa bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan proses administrasi kurikulum. Berikut penjelasan mengenai pelaksanaan kurikulum pada tingkat sekolah dan tingkat kelas:

1. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Sekolah

Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Tanggungjawab kepala sekolah adalah sebagai pemimpin, administrator, penyusun rencana tahunan, pembinaan organisasi sekolah, koordinator dalam pelaksanaan kurikulum, kegiatan memimpin rapat kurikuler, sistem komunikasi dan pembinaan kurikuler.

2. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Kelas

Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tersebut meliputi tiga jenis kegiatan administrasi, yaitu pembagian tugas

mengajar, pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan pembagian tugas bimbingan belajar.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kurikulum merupakan suatu usaha untuk menggerakkan anggotanya dalam melakukan kegiatan yang direncanakan sebelumnya mengenai kurikulum yang sudah didesain sedemikian rupa oleh sekolah/madrasah. Dalam hal ini kemampuan kepala sekolah sangat berpengaruh untuk mengarahkan jalannya proses pelaksanaan kurikulum yang baik.

D. Pengawasan Kurikulum

Terry mengemukakan bahwa “controlling is determining what is being accomplish, that evaluating performance and if necessary applying corrective measure so performance take place according to plans”. Kutipan tersebut memberikan pengertian bahwa pengawasan merupakan usaha sistematis dengan terlebih dahulu menetapkan standar pencapaian tujuan, metode yang digunakan untuk mengukur hasil yang dicapai dan upaya yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan terhadap tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Sedangkan pengawasan menurut Murdick yang dikutip oleh Nanang Fattah memiliki 3 tahap, yakni: (1) menetapkan standar pelaksanaan, (2) pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan standar dan rencana.

Pengawasan dalam kurikulum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan secara langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh yayasan, kepala madrasah maupun pengawas madrasah dari dinas pendidikan setempat. Melalui pengawasan tersebut, kepala madrasah atau pengawas pendidikan melakukan pengawasan dengan mendatangi secara langsung ke ruang kelas dan melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran yang sedang berlangsung. Sedangkan pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh kepala madrasah pada waktu tertentu terhadap proses pembelajaran tanpa diketahui oleh guru dan siswa.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk

memonitoring pelaksanaan kurikulum baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini dilakukan agar proses pelaksanaan kurikulum dapat terarah dan menghindari terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan perencanaan yang sudah ditetapkan pada tahap awal proses dibentuknya kurikulum.

E. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi ialah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah/madrasah dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan.

Evaluasi merupakan kegiatan yang luas, kompleks dan terus-menerus untuk mengetahui proses dan hasil dari pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi kurikulum bukan hanya mengevaluasi hasil belajar siswa dan proses pembelajarannya, tetapi juga desain dan implementasi kurikulum, kemampuan dan kinerja guru, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana, fasilitas dan sumber-sumber belajar, dan lain-lain.

Evaluasi mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif digunakan untuk perbaikan dan perkembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk, dan sebagainya). Sedangkan fungsi sumatif digunakan untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Oleh karena itu, evaluasi hendaknya membantu pengembangan implementasi, kebutuhan program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat.

Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan terhadap kurikulum yang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi bertujuan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum. Selain itu, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Baik atau tidaknya manajemen kurikulum yang dilaksanakan dapat diukur

dengan adanya evaluasi kurikulum sebagai perbaikan berkelanjutan pada masa mendatang.

Evaluasi pada kurikulum perlu memperhatikan beberapa model kurikulum yang harus diterapkan demi tercapainya proses evaluasi kurikulum yang efektif dan efisien. Beberapa model yang dapat diterapkan dalam evaluasi kurikulum tersebut diantaranya:

1. Model *Measurement*

Konsep pada model ini memberikan penekanan pada pentingnya objektivitas dalam prosedur evaluasi. Di samping itu, pendekatan yang digunakan pada konsep ini dirasakan manfaatnya dalam berbagai kegiatan pendidikan. *Measurement is not evaluation, but it can provide useful data or for evaluation.* Sebagai konsekuensi dari penekanan yang berlebihan pada aspek pengukuran, evaluasi cenderung dibatasi pada dimensi tertentu dari program pendidikan yang dapat diukur, terutama hasil belajar yang bersifat kognitif.

2. *Congruence*

Konsep dengan model ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kurikulum yang sedang dikembangkan. Hal ini merupakan balikan pada pengembangan kurikulum yang

sudah mencapai tujuan dan yang belum. Hasil evaluasi yang diperoleh tidak bersifat relatif karena dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai kriteria perbandingan. Kelemahan pada konsep dengan model evaluasi ini terletak pada ruang lingkup evaluasinya. Model evaluasi ini memberikan sumbangan bagi perkembangan konsep evaluasi kurikulum, khususnya dalam usaha menghubungkan hasil belajar dengan tujuan pendidikan sebagai kriteria perbandingan dan memperkenalkan sistem pengolahan hasil evaluasi secara bagian demi bagian, relevan dengan kebutuhan pengembangan kurikulum.

3. *Illumination*

Konsep ini menekankan pentingnya evaluasi yang berkelanjutan selama proses pelaksanaan kurikulum berlangsung. Kelemahan konsep ini terletak pada teknis pelaksanaannya. Pertama, kegiatan evaluasi tidak didahului oleh adanya perumusan kriteria yang jelas sebagai dasar pelaksanaan dan penyimpulan hasil evaluasi. Kedua, objektivitas evaluasi yang perlu dipersoalkan. Disamping itu, konsep ini menitikberatkan penggunaan judgement dalam proses evaluasi yang juga terdapat

kecenderungan menggunakan alat evaluasi yang terbuka, kurang spesifik, dan berstruktur.

Evaluasi kurikulum dilaksanakan untuk menilai sejauh mana kurikulum yang diterapkan di sekolah/madrasah dalam mencapai tujuan pendidikan. Apabila terdapat kekurangan atau bahkan kesalahan dalam prosesnya maka, dilakukan perbaikan pada masa mendatang sampai tercapainya tujuan pendidikan nasional.

BAB IV

PRINSIP DAN FUNGSI MANAJEMEN KURIKULUM

A. Prinsip Manajemen Kurikulum

Berkaitan dengan prinsip manajemen ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum yakni:

1. Produktivitas, ialah hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum.
2. Demokratisasi, ialah pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
3. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum

perlu adanya kerja sama yang positif dari seluruh pihak yang terlibat.

4. Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga dapat memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.
5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Dalam proses pendidikan perlu manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum.

Selain prinsip diatas, hal lain yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah maupun Departemen Pendidikan Nasional, seperti UUSPN No. 20 Tahun 2003, kurikulum pola nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijakan penerapan KTSP, serta keputusan dan

pengaturan pemerintah yang berkaitan dengan lembaga pendidikan atau jenjang sekolah yang bersangkutan.

Untuk menghasilkan kurikulum yang baik maka prinsip manajemen kurikulum di atas perlu diterapkan dan di implementasikan dengan memaksimalkan sumber daya dan komponen kurikulum yang ada pada lembaga pendidikan. Dengan demikian, prinsip manajemen kurikulum penting dilaksanakan demi menunjang proses kurikulum yang efektif dan efisien.

B. Fungsi Manajemen Kurikulum

Beberapa fungsi manajemen kurikulum diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum yang dapat ditingkatkan melalui pengelolaan terencana dan efektif.
- b. Meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai oleh peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tapi juga memerlukan kegiatan

ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.

- c. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan di sekitar peserta didik kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
- d. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
- e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar dan proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung. Dengan demikian ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindari. Disamping

itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam pengelolaan kurikulum.

- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan, kurikulum yang dikelola secara professional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar yang disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

BAB V

KURIKULUM MUATAN LOKAL

A. Pengertian Kurikulum Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah. Isinya meliputi bahan pelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan muatan lokal. Sedangkan media penyampaiannya merupakan metode dan sarana yang digunakan dalam penyampaian muatan lokal.

Definisi lain dari muatan lokal yaitu seperangkat rencana dan pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, dan

bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keberagaman daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, dan lingkungan masing-masing daerah serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tujuan pendidikan tertentu.

Sedangkan definisi kurikulum muatan lokal menurut Mulyasa merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah setempat sesuai keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kurikulum muatan lokal adalah proses pengaturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar mengenai isi bahan pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di lingkungan daerah.

B. Landasan Kurikulum Muatan Lokal

Landasan pelaksanaan kurikulum muatan lokal mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0412/U/1987. Sebagai penjabarannya

tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Nomor 173/-C Kep/M/1987. Kemudian, dalam perkembangannya keberadaan kurikulum muatan lokal menjadi bertambah kuat dengan dijadikannya muatan lokal sebagai isi dan struktur kurikulum yang harus diberikan pada tingkat dasar dan menengah. Hal ini tercantum dalam Pasal 37 UU No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menerangkan bahwa sekolah dasar dan menengah terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/jurusan, dan muatan lokal.

Secara rinci pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal berlandaskan pada undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.

C. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal

Pengembangan kurikulum muatan lokal dimaksudkan untuk mengimbangi kelemahan pengembangan kurikulum sentralisasi, dan bertujuan agar peserta didik mencintai dan mengenal lingkungannya, serta mau dan mampu melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam kualitas sosial dan kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional, pembangunan regional, maupun pembangunan lokal. Sehingga peserta didik tidak terlepas dari akar sosial budaya lingkungannya.

Dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal membutuhkan penanganan secara profesional yang menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholders) yakni madrasah dan komite sekolah. Pengembangan mata pelajaran muatan oleh madrasah dan komite sekolah dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah.
2. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal.
3. Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal.
4. Menentukan mata pelajaran muatan lokal.

Pengembangan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta silabus mengacu pada standar isi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).⁶⁹ Dengan demikian, di samping mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional maka perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum muatan lokal sebaiknya dirancang dengan memperhatikan keseimbangan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Hal ini perlu dilakukan agar proses pendidikan dapat berjalan selaras antara kurikulum nasional dengan kurikulum muatan lokal agar tujuan dari pendidikan nasional dapat tercapai secara maksimal.

D. Fungsi dan Tujuan Kurikulum Muatan Lokal

1. Fungsi Kurikulum Muatan Lokal

Kurikulum muatan lokal memiliki fungsi-fungsi dalam menunjang pendidikan nasional di Indonesia. Menurut Oemar Hamalik, fungsi dari kurikulum muatan lokal dibedakan menjadi dua yaitu fungsi penyesuaian dan fungsi integrasi. Fungsi-fungsi tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Fungsi Penyesuaian

Madrasah merupakan komponen yang tidak lepas dari masyarakat, sebab madrasah berada didalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, program madrasah harus disesuaikan dengan lingkungan, kebutuhan daerah, dan masyarakat setempat.

b. Fungsi Integrasi

Peserta didik adalah bagian integral dari masyarakat. Oleh sebab itu, muatan lokal merupakan program pendidikan yang berfungsi mendidik pribadi-pribadi peserta didik agar dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan lingkungannya, serta berfungsi dalam membentuk dan mengintegrasikan pribadi peserta didik dengan masyarakatnya.

c. Fungsi Perbedaan

Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda, maka muatan lokal adalah program pendidikan yang bersifat luwes, artinya program yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan dan kebutuhan peserta didik di lingkungan daerahnya.

E. Tujuan Kurikulum Muatan Lokal

Tujuan muatan lokal dijelaskan dalam Depdiknas, yakni untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku siswa agar memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional.⁷¹ Selain itu, tujuan dari kurikulum muatan lokal adalah untuk membangun potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah. Karena keragaman budaya pada setiap daerah berbeda-beda, maka hal ini perlu dipertahankan sebagai bagian dari budaya di Indonesia.

Selain tujuan yang telah dijelaskan di atas tujuan muatan lokal secara ringkas penyelenggaraan dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal juga mempunyai tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Masing-masing tujuan tersebut secara rinci dijelaskan di bawah ini:

1. Tujuan Langsung
 - a. Bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid.
 - b. Sumber belajar di daerah lebih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

- c. Murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya.
 - d. Peserta didik lebih dapat mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerah tersebut.
2. Tujuan Tidak Langsung
- a. Peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerah tersebut.
 - b. Peserta didik diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - c. Peserta didik akrab dengan lingkungan dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungan sendiri.

F. Ruang Lingkup Muatan Lokal

Ruang lingkup dalam muatan lokal perlu diperhatikan agar dalam prosesnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerahnya masing-masing. Dalam hal ini ruang lingkup muatan local terbagi menjadi ruang

lingkup keadaan dan kebutuhan daerah serta lingkup isi/jenis muatan lokal yang diuraikan di bawah ini:

1. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Sedangkan kebutuhan daerah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, dan disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan.⁷³ Oleh karena itu, muatan lokal penting tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, tetapi dalam meningkatkan kelangsungan hidup yang ada pada masing- masing lingkungan daerah tersebut.

2. Lingkup isi/jenis muatan local

Lingkup isi/ jenis dalam muatan lokal dapat berupa: bahasa daerah, bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin, dll), kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas di

lingkungan alam sekitar, serta hal yang dianggap perlu oleh daerah sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut.

Penjelasan mengenai ruang lingkup di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam menentukan muatan lokal harus melihat situasi dan kondisi yang dibutuhkan serta potensi yang ada dalam masyarakat. Selain mengajarkan pada peserta didik tentang lingkungannya, muatan lokal dapat meningkatkan kelangsungan hidup di daerahnya.

BAB VI

SUMBER BAHAN PELAJARAN MUATAN LOKAL

Dalam menentukan sumber bahan pelajaran muatan lokal memerlukan kerja sama pihak-pihak yang terkait, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan daerah. Bahan pengajaran yang perlu dikembangkan sebagai penambah bahan kurikulum pendidikan nasional akan berkisar pada beberapa konsep diantaranya:

- a. Bahasa terutama bahasa daerah.
- b. Nilai-nilai budaya masyarakat, seperti adat isitiadat, norma susila, etika masyarakat.
- c. Lingkungan geografis daerah setempat.
- d. Lingkungan alam daerah setempat.
- e. Kesenian yang ada pada masyarakat setempat.
- f. Berbagai jenis kesenian masyarakat yang sedang berkembang dan diperlukan masyarakat setempat.
- g. Aspek penduduk/masyarakat daerah setempat.
- h. Olahraga dan kesenian masyarakat setempat.

Dari konsep diatas, tentu sangatlah berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Setiap daerah mempunyai karakteristik masing-masing yang menjadi keanekaragaman budaya di Indonesia. Oleh karena itu, konsep pengembangan dan penulisan sebagai bahan ajar untuk peserta didik harus dilaksanakan dengan adanya dukungan dan bantuan dari seluruh pihak daerah setempat. Bahan muatan lokal itu sendiri memiliki ciri-ciri yang khas dibandingkan dengan bahan ajar di luar muatan lokal. Diantara ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Luas dan ukuran bahan tidak kaku.
- b. Sebagian besar bahan ajaran pelaksanaannya dapat diberikan secara ekstrakurikuler.
- c. Guru terdiri dari narasumber yang mungkin tidak berprofesi guru. Sebagian besar bahan muatan lokal dapat dilaksanakan dengan metode: karya wisata, drill, demonstrasi, learning by doing, dan dapat dilaksanakan dengan mengikuti kursus di luar sekolah.

Dalam mengembangkan bahan mata pelajaran muatan lokal sepenuhnya di tangani oleh madrasah dan

komite madrasah yang membutuhkan penanganan secara profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan memperhatikan keseimbangan dari kurikulum 2013. Proses penentuan sumber bahan pelajaran muatan lokal juga berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada pada masing- masing daerah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran.

BAB VII

KURIKULUM PESANTREN

A. Pengertian Kurikulum Pesantren

Istilah pesantren sesungguhnya berasal dari kata santri, yang mendapat awalan pe dan akhiran an sebagai tempat tinggal para santri dalam menimba ilmu agama. Kata santri juga berarti orang yang mendalami pengetahuannya dalam bidang agama Islam. Sebagai bagian penting dari pesantren, santri merupakan sekelompok orang yang memiliki ketekunan dalam mempelajari kajian kitab-kitab kuning (klasik) yang memuat berbagai ilmu agama, seperti fiqh, tasawuf, tafsir, tauhid, hadits dan sebagainya.

Menurut Halim, pesantren ialah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu keislaman yang dipimpin oleh seorang kiai sebagai pemangku/pemilik pondok pesantren dengan bantuan dari ustadz/guru yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman pada santri melalui metode dan teknis yang khas. Pesantren juga bisa dikatakan sebagai wadah untuk memperdalam agama sekaligus sebagai pusat penyebaran agama.

Manfred Ziemek mendeskripsikan peran dan fungsi lembaga pesantren bagi proses pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Ziemek melihat bahwa Islam mempunyai potensi pendidikan dan kemasyarakatan di Indonesia yang dapat dilihat pada pesantren tradisional. Oleh karena itu, ia mencoba menggambarkan praktik pendidikan yang sering terjadi pada lapisan pedesaan dan menjelaskan keberadaan pesantren tradisional sebagai bentuk pendidikan yang diorganisir oleh masyarakat sendiri. Sehingga ia menyimpulkan bahwa pesantren merupakan tempat pusat pengembangan di bidang pendidikan, politik, budaya, sosial, dan keagamaan.

Sedangkan pondok pesantren menurut M. Arifin yaitu suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh lingkungan masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa kiai dengan ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.

Sebagai lembaga pendidikan Islam, tampak jelas bahwa prinsip-prinsip pendidikan di pesantren bersifat

teosentris. Orientasi pendidikan pesantren memusat pada sikap taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah dengan keteguhan dan ketaatan beribadah serta melaksanakan doktrin-doktrin agama secara ketat) dan sikap tahassun (melaksanakan amal saleh, baik secara individual maupun kesalehan sosial, dan perilaku yang etis serta bermanfaat).

Kurikulum pesantren dalam pengertian selanjutnya mengacu pada pengertian luas yang meliputi kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, sehingga melibatkan aktivitas yang diperankan santri dan juga diperankan kiai. Demikian juga kegiatan yang memiliki bobot wajib diikuti maupun sekedar anjuran termasuk liputan kurikulum ini. Oleh karena itu, model kurikulum yang dibakukan harus berupa terwakilnya semua unsur ilmu agama secara minimal di dalamnya.

Kurikulum pendidikan pesantren menurut Abdurrahman Wahid adalah sebuah pola yang tetap. Pola tersebut terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, kurikulum dimaksudkan untuk mencetak ulama. Kedua, struktur dasar kurikulum berupa pengajaran ilmu agama dalam segenap tingkatan dan pemberian pendidikan dalam bentuk bimbingan kepada santri secara pribadi oleh kiai.

Ketiga, secara keseluruhan kurikulum bersifat lentur atau fleksibel. Artinya, santri memiliki kesempatan menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, bahkan pada pesantren yang memiliki sekolah sekalipun.⁸²

Dari definisi pesantren di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum pesantren merupakan alat yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren yang isinya tidak lain meliputi tujuan, isi, bahan, strategi, dan evaluasi.

B. Tujuan Kurikulum Pesantren

Tujuan kurikulum pesantren tidak hanya untuk mencetak santri yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi, namun juga mampu mengintegrasikan ilmu, iman, dan amal sebagai landasan fundamental dalam memperkuat hakikat pendidikan Islam. Hakikat tujuan kurikulum pesantren sejatinya berupaya meningkatkan kualitas sumber daya umat Islam agar terus semangat dalam mencari ilmu dan meningkatkan potensi ke arah yang menjanjikan.

Mastuhu berpendapat bahwa tujuan dari pendidikan pesantren adalah menciptakan dan menggambarkan kepribadian muslim yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau khidmat kepada masyarakat dengan menjadi abdi masyarakat seperti kepribadian Nabi Muhammad SAW yang mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menegakkan agama Islam, serta mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.⁸⁴

Pondok pesantren memiliki tujuan tidak tertulis yang berbeda- beda, karena sikap filosofis para kiai secara individual tidak sama, ada yang luas ada yang sempit. Namun, tujuan tersebut dapat diasumsikan sebagai berikut:

- a. Tujuan khusus: mempersiapkan santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan dan mengamalkannya dalam masyarakat.
- b. Tujuan umum: membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang

sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat melalui ilmu dan amalnya.

C. Elemen-Elemen dalam Kurikulum Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan Islam pesantren memiliki karakteristik yang mendukung berjalannya seluruh proses kegiatan pesantren. Karakteristik tersebut tentunya berbeda-beda antara pesantren yang satu dengan yang lainnya. Demi tercapainya keberhasilan dalam dunia pesantren, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan harus di perhatikan untuk menancapkan kiprahnya dalam dunia pergulatan pendidikan Islam di Nusantara.

Menurut Zamakhsyari Dhofier, ada lima elemen dasar yang berkaitan langsung dengan karakteristik dalam tradisi pesantren, yaitu:

1. Pondok atau Asrama

Pondok atau asrama merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal para santri dalam menuntut ilmu. Pembangunan pondok atau asrama ini menjadi simbol pesantren yang memiliki elemen paling penting dalam menunjang proses pembelajaran santri yang

mebutuhkan siraman rohani dan ketenangan jiwa. Ada pun alasan utama mengapa pesantren harus menyediakan asrama bagi para santri.

Pertama, kemasyhuran kiai dan pengetahuan kedalamannya tentang Islam menarik minat santri-santri yang berasal dari daerah yang jauh. Demi memperoleh keberkahan ilmu dari sang kiai, para santri harus meninggalkan kampung halamannya dan menetap di dekat kediaman kiai. Kemudian, asrama merupakan tempat tinggal sementara bagi mereka.

Kedua, hampir semua pesantren berdomisili di desa-desa di mana tidak tersedia perumahan atau pemukiman yang cukup untuk dapat menampung santri-santri. Alhasil, asrama khusus menjadi keniscayaan bagi para santri.

Ketiga, terdapat timbal balik antara kiai dan santri, di mana para santri menganggap kiainya seolah-olah sebagai bapaknya, sementara kiai menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi. Dengan sikap timbal balik tersebut, diharapkan dapat menimbulkan keakraban dan kebutuhan untuk saling berdekatan secara terus-menerus tanpa merasa malu atau sungkan. Sikap ini

juga menyimpan perasaan tanggung jawab pihak kiai untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para santri.⁸⁷

Pondok pesantren menjadi ciri khas dalam pesantren sekaligus membedakan dengan pendidikan umum yang lain. Adanya pondok mempermudah para santri untuk memperoleh ilmu yang dapat dipantau selama 24 jam dalam mendukung aktivitas santri untuk melakukan berbagai jenis kegiatan keagamaan.

2. Masjid

Adanya masjid tidak lepas dari dunia pendidikan Islam karena ia adalah salah satu pusat pengembangan ajaran Islam pada masa awal Islam. Keberadaannya menjadi sangat vital menuntut pesantren untuk membangun masjid sebagai tempat untuk mendidik santri, sholat lima waktu, dan pengajian kitab klasik. Kiai yang ingin mengembangkan pondok pesantren biasanya pertama akan mendirikan masjid di dekat rumahnya.

Di pesantren tradisional, masjid dipergunakan untuk mengajarkan kitab keislaman klasik dengan metode wetonan. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat diskusi masalah keagamaan di mana santri membuat

kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah aktual yang muncul di tengah masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan istilah syawir (musyawarah).

Keberadaan masjid merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam tradisi pesantren, karena tempat yang paling utama digunakan untuk aktivitas santri adalah masjid. Sehingga, pesantren tidak dapat dikatakan pesantren apabila didalamnya tidak terdapat masjid. Peran masjid dalam dunia pesantren menjadi sangat penting karena menjadi tempat strategis untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di pesantren. Selain itu, masjid juga dapat digunakan sebagai sarana informasi yang baik bagi santri.

3. Pengajaran Kitab Kuning

Istilah kitab merupakan istilah khusus yang digunakan untuk menyebut karya tulis berbahasa arab untuk membedakan dengan karya tulis yang bukan berbahasa arab atau yang disebut dengan buku. Selain itu, istilah kitab kuning dikenal dengan istilah “kitab gundul” karena pada umumnya kitab ini tidak diberikan harakat/syakal dan ada pula yang menyebutnya dengan

“kitab kuno” karena rentang waktu sejarah yang sangat jauh sejak disusun/diterbitkan sampai sekarang.

Kemampuan santri dalam membaca kitab kuning/klasik adalah kriteria yang paling mendasar untuk menilai kemampuan santri. Kitab kuning/klasik merupakan kumpulan modifikasi tata nilai yang dianut oleh pesantren. Hal ini menjadi sesuatu yang membedakan keberadaan pesantren dengan lembaga pendidikan lain. Oleh sebab itu, kitab kuning telah menjadi karakteristik yang tidak dapat dipisahkan sekaligus sebagai ciri khas dari proses belajar mengajar di pesantren.

Pengajaran kitab kuning sudah menjadi ciri khas dalam pesantren, oleh karena itu tradisi pengajaran kitab kuning tidak boleh dihilangkan dan harus selalu dilestarikan. Hal ini menjadi tantangan pesantren untuk terus melestarikan budayanya agar tidak punah seiring dengan kemajuan zaman pada era globalisasi.

4. Santri

Dalam sistem pendidikan Islam tradisional, santri menjadi salah satu elemen penting dalam mewakili kealiman figur pimpinan pesantren. Santri merupakan ciri

khas yang melekat di lingkungan pesantren, dan menjadi subjek utama dalam mendalami kitab Islam klasik. Santri menjadi bagian vital dalam sistem pendidikan pesantren, santri harus tunduk dan patuh pada wejangan kiai yang berwenang penuh dalam setiap kebijakan pesantren.

Dalam tradisi pesantren santri memiliki terdapat 2 kelompok santri yakni:

1. Santri mukim, ialah murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pesantren. Merekalah yang bertanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah.
2. Santri kalong, ialah murid yang berasal dari desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren, untuk mengikuti pelajaran di pesantren mereka bolak-balik (nglajo) dari rumahnya sendiri.

Kesuksesan pengelolaan pondok pesantren dapat dilihat melalui santri yang ada pada pondok tersebut. Semakin banyak santri, maka semakin baik pula pengelolaan pondok pesantren tersebut. Selain itu, karakter

santri menjadi cerminan dari pondok pesantren yang ditempati, sehingga santri menjadi simbol penting pesantren dalam menunjang kemajuan pendidikan agama Islam.

5. Kiai

Elemen penting lain dalam lingkungan pesantren adalah figur kiai. Keberadaan kiai merupakan figur utama dalam menjalankan segala aktivitas keagamaan yang berkaitan secara langsung dengan masa depan pesantren. Gelar kiai kepada seseorang bukan karena penyematan, seperti pemberian gelar akademik atau gelar kehormatan, tetapi berdasarkan keistimewaan individu dalam perspektif agama yang memiliki sifat kenabian, seperti kedalaman ilmu agama, amanah, zuhud, tawadhu, dan sebagainya.

Istilah kiai berasal dari bahasa Jawa yang memiliki asal usul dan makna yang berbeda-beda, makna tersebut adalah:

1. Kiai sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat.
2. Kiai sebagai gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.

3. Kiai sebagai gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya.

Dalam hal ini kiai sangat berperan dalam kemajuan pendidikan pesantren untuk melahirkan generasi-generasi penerus yang mampu bersaing dan menghadapi segala bentuk tantangan global yang semakin pesat. Selain itu, perkembangan pesantren bergantung pada pemimpin pesantren (kiai) yang akan menjadi contoh bagi para santrinya untuk keberlangsungan kehidupan pesantren pada masa mendatang. Semakin banyak jumlah santri dalam pondok pesantren, semakin baik pula kepemimpinan kiai dalam mengelola pesantren tersebut

BAB VIII

METODE IMPLEMENTASI KURIKULUM PESANTREN

A. Implementasi Kurikulum di Pesantren

Sejak awal berdirinya pesantren media pembelajaran yang diterapkan sangat sederhana. Tidak ada klasifikasi kelas, tidak ada kurikulum, dan tidak ada aturan yang baku didalamnya. Sebagai media pembelajaran keagamaan, tidak pernah ada kontrak atau permintaan santri kepada kiai untuk mengkajikan sebuah kitab. Semuanya bergantung pada kyai sebagai poros sistem pembelajaran pesantren. Mulai dari jadwal, metode, bahkan kitab yang hendak diajarkan, semuanya merupakan wewenang dari kiai secara penuh.

Dalam melaksanakan pendidikan setiap Pondok Pesantren memiliki metode pengajaran yang berbeda-beda. Berbagai metode pengajaran yang dilaksanakan di Pondok Pesantren diantaranya:

- a. Bandongan atau wetonan, merupakan metode pengajaran dengan cara kiai membacakan kitab tertentu, santri mendengarkannya, tanpa ada

pertanyaan, demikian seterusnya hingga kitab yang dipelajari dan diajarkan kiai selesai.

- b. Sorogan, yaitu metode pengajaran yang dilakukan oleh keinginan santri karena santri mengajukan kitab kuning tersendiri dan membacaknya di depan kiai, jika ada yang salah, kiai membetulkannya.
- c. Muhawarah, yaitu metode pengajaran bahasa arab dengan cara menggunakannya melalui muhadatsah selama santri tinggal di pondok.
- d. Muadzakarah, yaitu metode pengajaran yang membahas tema tertentu dan kajiannya lebih spesifik, misalnya membahas bab ibadah atau muamalah secara ilmiah.
- e. Majelis taklim, yaitu penyampaian ajaran Islam secara umum dan terbuka.

Pesantren dalam menghadapi perubahan zaman terus melakukan pembaruan sistem pendidikan pesantren yang melahirkan perubahan pada metode dan materi pengajarannya. Pada saat ini metode pengajaran telah banyak menempuh kurikulum campuran antara yang

agama dan umum. 99 Sebagai implikasi pengajaran di pesantren sudah dilaksanakan dengan sistem kelas, kurikulum, sistem ujian dan menerapkan metodologi pembelajaran modern. Tentu saja dengan tetap mempertahankan kajian-kajian teks-teks klasik Islam dalam berbagai keilmuan. 100 Dengan demikian, implementasi kurikulum pesantren harus menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan, di samping itu tetap meneruskan sistem wetonan dan sorogan.

Dari berbagai metode pengajaran diatas dapat disimpulkan bahwa metode pengajaran sangatlah berperan penting dalam tercapainya proses pembelajaran yang efektif. Selain itu, metode pengajaran yang digunakan ditentukan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan madrasah. Metode pengajaran di pesantren juga dapat dijadikan sebagai ciri khas dari pesentren tersebut, karena bagaimana metode pengajaran yang dilaksanakan akan mewujudkan keberhasilan belajar santri.

B. Evaluasi Kurikulum Pesantren

Menurut Zaekasyi Dhofier evaluasi atau penilaian keberhasilan dalam kurikulum pesantren ditentukan oleh

penampilan kemampuan mengajarkan kitab kepada orang lain. Artinya jika audiennya puas, berarti santri tersebut telah lulus, sehingga legitimasi kelulusannya adalah restu kiai. Sedangkan menurut Mastuhu bentuk evaluasi kurikulum pesantren lainnya adalah selesainya pengajian suatu kitab pesantren dalam waktu tertentu, lalu diberikan ijazah yang bentuknya adalah santri harus siap membaca kitab sewaktu-waktu kiai memanggilnya untuk membaca kitab tersebut.

Namun dalam penyebaran arus globalisasi yang semakin pesat memberikan tantangan baru yang harus dihadapi oleh pesantren agar tetap meningkatkan eksistensinya dalam dunia global. Evaluasi atau penilaian objektif terhadap langkah-langkah yang pernah ditempuh diperlukan untuk menjadi bagian integral dari sistem manajerial pesantren. Dengan demikian, segala hal yang dilaksanakan masa lalu yang tidak strategis harus dikoreksi secara menyeluruh, sementara langkah positif-konstruktif harus tetap dipertahankan dan berupaya ditingkatkan. Hal ini juga berkaitan dengan kurikulum yang dilaksanakan pesantren.

Kurikulum pesantren harus selalu melakukan upaya rekonstruksi pemahaman terhadap ajaran-ajarannya agar tetap relevan dan survive. Oleh karena itu, pesantren harus mampu mewujudkan kurikulum yang sinergik dengan memadukan akar tradisi dan modernitas.¹⁰² Salah satu hal yang dapat dirubah dalam tolak ukur keberhasilan pesantren atau evaluasi kurikulum di pesantren adalah dengan merubah ukuran keberhasilan pesantren yang selama ini bersandar pada kemahiran membaca Kitab Kuning. Realitas ini dikarenakan kompleksnya permasalahan umat yang dihadapkan kepada masyarakat sekarang. Karenanya, seorang santri tidak cukup hanya bermodal kemampuan mencerna kitab- kitab kuning, tetapi juga dituntut untuk mengkorelasikan dengan disiplin ilmu-ilmu humaniora. Selain itu evaluasi dalam kurikulum pesantren juga dapat dirubah ke bentuk ujian (imitihan) resmi dengan sistem pemberian angka-angka tanda lulus atau naik tingkat bahkan dengan ijazah (formal).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam pesantren saat ini sudah bertransformasi mengikuti arus perkembangan zaman dimana evaluasi di pesantren dapat dilakukan dengan metode-metode yang

ada dalam sekolah-sekolah yaitu berbentuk ujian tertulis, namun dalam hal ini bukan berarti tradisi pesantren terdahulu. Evaluasi pesantren tetap dijalankan dengan memadukan metode evaluasi pembacaan kitab kuning dan bentuk tes tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger. 2020. Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi. Malang: AE Publishing.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Jejak.
- Anwar, Abu. Karakteristik Pendidikan dan Unsur-Unsur Kelembagaan Di Pesantren. Vol. 2, Nomor 2, Desember 2016.
- Arief, Armai. 2002. Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Press.
- Arifin, M. 1995. Kafita Selektika Pendidikan Islam (Islam dan Umum). Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Samsul dan Anisah. Dinamika Pendidikan Pesantren. Vol. 10, Nomor 2, Desember 2019.
- Arifin, Zainal. 2012. Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Jogjakarta: DIVA Press. 2014. Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bafadhal, Ibrahim. 2015. Panduan Teknis Pengembangan Muatan Lokal Di Sekolah Dasar. Jakarta: Kemendikbud.

- Dakir. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Dawan, Ainurrofiq dan Ahmad Ta'arifin. 2005. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Jakarta: Listafariska Putra.
- Fahham, Achmad Muchaddam. 2015. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Publica Institute.
- Firmansyah, M. Anang dan Budi W. Mahardhika. 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Haedani, Amin, dkk. 2004. *Panorama, Pesantren Dalam Cakrawala Modern*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Hakim, Abdul & N. Hani Herlina. *Manajemen Kurikulum Terpadu di Pondok Pesantren Modern Darul Huda Banjar*. Vol. 6, Nomor 1, Februari 2018.
- Hamalik, Oemar. 2007. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamid, Hamdani. 2018. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haromain, Imam, dkk. 2009. *Pedoman dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan MTs*. Jawa Timur: Mapemda Kantor Wilayah.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hidayati, Wiji, dkk. 2021. *Manajemen Kurikulum Dan Program Pendidikan (Konsep Dan Strategi Pengembangan)*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Istiqomah, Eti. 2016. *Manajemen Kurikulum Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto*, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Jazuli, Syukron. 2018. *Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pesantren Dalam Mencapai Visi Misi Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Jayasakti Anak Tuha Lampung Tengah*, Tesis. Lampung Tengah: IAIN Metro.
- Khaeruddi, dkk. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan Implementasinya di Madrasah*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Kompri. 2018. *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurikulum, Pusat Balitbang Depdiknas. 2007. *Model Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal SD/MI/SDLB*, Jakarta: Depdiknas.
- Ma'arif, Fatkhul. *Manajemen Kurikulum*. Vol. 3, November 2020.108

- Mahmudah, Fitri Nur. 2021. Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas. TI 8. Yogyakarta: UAD Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mughits, Abdul Mughits. 2008. Kritik Nalar Fiqh Pesantren. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin, dkk. 2009. Manajemen Pendidikan: Aplikasi Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Prenada media Group.
- Mulyasa. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Satategi, dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, Sri, dkk. 2021. Pengantar Manajemen. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Nasbi, Ibrahim. Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis. Vol. 1, Nomor 2, Desember 2017.
- Nasir, Muhammad. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan Islam di Madrasah. Vol. 10, Nomor 1, Juni 2013.
- Nasution, S. 1994. Asas-Asas Kurikulum. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Sangkot Nasution. Pesantren: Karakteristik dan Unsur-Unsur Kelembagaan. Vol. 8, No. 2, Juli 2019.
- Nihwan, Muhammad dan Paisun. Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf dan Modern). Vol. 2, Nomor 1, Maret 2019.

- Nurdin, Syafruddin, dkk. 2002. Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum. Jakarta: Ciputat Press.
- Nurkholis. 2015. Santri Wajib Belajar. Purwokerto: STAIN Press.
- RI, Departemen Agama. 2005. Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009. Jakarta: DEPAGRI.
- Rusman. 2009. Manajemen Kurikulum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saajidah, Luthfiyyah. Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Kurikulum. Vol. 3, No. 2, Desember 2018.
- Samrin, Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia. Vol.8, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Saputra, Adi. Prinsip-Prinsip Manajemen Kurikulum. Vol. 13, Nomor 2, Juli 2014.
- Saputri, Rima Yuni. Implementasi Landasan Sosiologis Dalam Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Keagamaan Di SMAN 1 Pleret Bantul. Vol. 3, Nomor 2, November 2020.
- Sasongko, Jatun Nur Adi. Manajemen Pesantren : Studi Kasus Di Mahad Tahfizh Isy Karima Kecamatan Karanpandan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Vol. 6, Nomor 1, Juni 2018.
- Septiana, Aldila. 2016. Pengantar Bisnis Dan Manajemen. Pamekasan: Duta Media Publishing.

- Setyaningsih, Rini. Kontinuitas Pesantren dan Madrasah di Indonesia. Vol. 11, Nomor 1, Juni 2016.
- Siswanto, B. 2015. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, dkk. 2017. Metodologi Penelitian Kombinasi Kualitatif Kuantitatif Kedokteran & Kesehatan. Klaten: Bosscript.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- SM, Ismail. 2002. Dinamika Pesantren dan Madrasah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soebahar, Abd. Halim. 2013. Modernisasi Pesantren Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren. Yogyakarta: LKiS.
- Stonner, James. A. F. 1992. Manajemen Edisi Keempat Jilid 1. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2020. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka baru Press.110
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2017. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulthon, M dan Khusnuridlo. 2006. Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global. Yogyakarta: Laksbang PressIndo.
- Suprihanto, John. 2014. Manajemen. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Surakhmad, Winarno. 1978. Dasar dan

- Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung: CV Tarsito.
- Suwendra, Wayan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. Bali: Nilacakra Publishing House.
- Syafa'atunnisa, Yuliani. 2018. Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pesantren : Studi Di MTs Al-Hikmah 2 Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Syukrianto. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Dalam Membentuk Karakter Lulusan Siswa SMA 2 Darul Ulum Rejoso Rembang. Vol. 6, Nomor 1, Februari 2019.
- Tafsir, Ahmad. 2004. Ilmu Pendidikan dan Perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Takdir, Mohammad. 2018. Modernisasi Kurikulum Pesantren Konsep dan Metode Antroposentris. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Tayibnapi, Farida Yusuf. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tolib, Abdul. Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern. Vol. 1, Nomor 1, Desember 2015.
- Usman, Husaini. 2019. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

- Utamy, Try Septy Tanys. Implementasi Manajemen Kurikulum 2013 Di MTs N Pandeglang Provinsi Banten. Vol. 4, Nomor 2, Desember 2018.
- Wahyudin, Dinn. 2014. Manajemen Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Walidin, Warul, dkk. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, Hendro dan Etyk Nurhayati. 2020. Manajemen Pendidikan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wijayanto, Dian. 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyani, Novan Ardy. 2017. Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran PAI SMA Berbasis Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

PROFIL PENULIS

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Siti Zulfah,S.Pd.I
2. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 09 April 1983
3. Alamat Rumah : Desa Karangpule RT 04/RW 01
Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga
4. Nama Ayah : Anton Rosadi
5. Nama Ibu : Kainah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 1 Karangpule Kecamatan Padamara, tahun lulus : 1996
 - b. MTS Kalikabong Kalimanah, tahun lulus : 1999
 - c. MA Ribatul Muta'alimin Pekalongan, tahun lulus : 2002
 - d. D2 STAINU Kebumen, tahun lulus : 2004
 - e. S1 UNDARIS UNGARAN Semarang
 - f. S2 IAINU Kebumen

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Ranting FATAYAT Kecamatan Padamara (2019-2023)

D. Riwayat Pekerjaan : Guru MI Ma'arif NU Karang Sari 2 (2013-Sekarang)

MANAJEMEN KURIKULUM MUATAN LOKAL BERBASIS PESANTREN



Pendidikan Islam di Indonesia menekankan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri sebagai warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena itu, sasaran utama pendidikan Islam adalah berusaha mengembangkan manusia seutuhnya yang dilaksanakan pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan, salah satunya adalah madrasah. Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama dan memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Dilihat dari realitas kehidupan di tengah-tengah masyarakat, minimnya pengetahuan moral dan agama pada generasi milenial memberikan permasalahan baru yang harus dihadapi madrasah untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman yang selalu berubah. Mata pelajaran yang diajarkan di madrasah dianggap cukup memberikan wawasan yang luas tentang pendidikan agama Islam, namun pada kenyataannya lulusan madrasah masih terlihat rendah dalam berbagai bidang, baik agama maupun umum. Buku ini terdiri dalam VIII Bab dimana dalam Bab I membahas tentang Urgensi Manajemen Kurikulum Muatan Lokal Di Pesantren, Bab II membahas tentang Manajemen Kurikulum, Bab III membahas tentang Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum, Bab IV membahas tentang Prinsip Dan Fungsi Manajemen Kurikulum, Bab V membahas tentang Kurikulum Muatan Lokal, Bab VI membahas tentang Sumber Bahan Pelajaran Muatan Lokal, Bab VII membahas tentang Kurikulum Pesantren, dan Bab VIII membahas tentang Metode Implementasi Kurikulum Pesantren



Penerbit
PT ARR RAD PRATAMA
Gunung Jati Cirebon Jawa Barat
Indonesia 45151
email : arrradpratama@gmail.com

ISBN 978-623-09-2893-2



9 786230 928932